

# ANALISIS PENGUKURAN KINERJA *VALUE FOR MONEY* PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR

Amelia Ika Pratiwi<sup>1</sup> dan Ela Nursandia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Jl. Veteran 12-16 Malang 65145  
Telp. 082333849510, amelia.pratiwi@ub.ac.id

<sup>2</sup>Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Jl. Veteran 12-16 Malang 65145  
Telp. 085746505551, enursandia@gmail.com

**Diterima: 26 Mei 2017**

**Layak Terbit: 10 Juli 2017**

**Abstract: Performance Measurement Analysis of Value for Money in Financial Management agency and Regional Assets of Blitar District.** This study aims to analyze and measure performance by using the method of Value For Money at the Regional Financial and Asset Management Agency Blitar District which consists of economic, efficiency and effectiveness in the program implemented in the Regional Financial and Asset Management Agency Blitar regency. The results of this study for the economy, the overall existing activities can already be said to be economical because the budget realisasi smaller than the existing target. For efficiency level BPKAD Kabupaten Blitar period 2015-2016 has run its programs related to the efficient management of regional assets. While the effectiveness of effectiveness measurement based on Performance Indicators relating to the management of regional assets. Two years of the period there are two performance indicators: Percentage of Certification of Land Assets of Regency Government and Percentage of Regional Assets that have been managed. Both performance indicators, on the percentage of local assets that have been managed effectively and on the Percentage of Certification of Land assets of the District Government is required evaluation because the achievement is still below the existing target.

**Keywords:** economy, efficiency, effectiveness

**Abstraksi: Analisis Pengukuran Kinerja Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur kinerja dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yang terdiri dari ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada program yang terimplementasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Hasil dari penelitian ini untuk ekonomi, keseluruhan kegiatan yang ada sudah dapat dikatakan ekonomis karena realisasi anggaran lebih kecil dari target yang ada. Untuk tingkat efisiensi BPKAD Kabupaten Blitar periode 2015-2016 telah menjalankan programnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah secara efisien. Sedangkan efektivitas pengukuran efektivitas berdasarkan Indikator Kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Dua tahun periode tersebut ada dua indikator kinerja yaitu Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten dan Persentase aset daerah yang telah dikelola. Kedua indikator kinerja tersebut, pada Persentase aset daerah yang telah dikelola sudah berjalan secara efektif dan pada Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten diperlukan evaluasi karena capaian masih di bawah target yang ada.

**Kata kunci :** ekonomi, efisiensi, efektivitas

Kinerja pada instansi pemerintah kini cukup menarik perhatian dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Pada era perkembangan ekonomi ini masyarakat juga menjadi semakin cerdas dan kritis menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan yang dilakukan masyarakat ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat.

Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga Mardiasmo (2009:121). Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

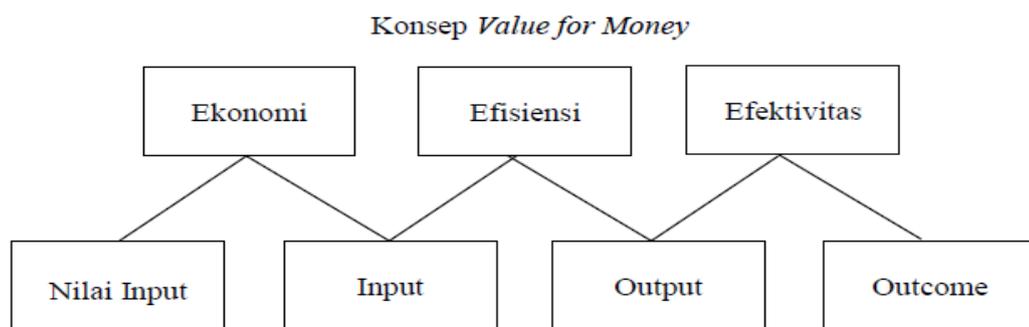
Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain menggunakan metode *Balance Score Card* dan metode *Value for Money*. *Balanced Score Card* pertama kali diperkenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial, sedangkan metode *Value for Money* digunakan pada sektor publik. Dalam metode *Balance Score Card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis/intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*growth and learn*), sedangkan dengan metode *Value for Money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang

ditetapkan Ulum (2004:270). Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran Mardiasmo, (2009:121).

Sebagai salah satu aparaturnya lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja *Value for Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Periode penelitian 2015-2016. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan *Value for Money* adalah penilaian kinerja yang meliputi efisiensi, efektivitas dan ekonomi. Secara skematis, *Value for Money* dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Mardiasmo 2004

**Gambar 1. Konsep *Value for Money***

Pengukuran Ekonomi

$$\text{Ekonomi} = \text{Target Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran}$$

Pengukuran Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Pengukuran Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian kerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini analisis data berdasarkan tiga elemen pengukuran *Value for Money* pada BPKAD Kabupaten Blitar:

### **Pengukuran Ekonomi**

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dan dapat mencapai *output* sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan Bastian (2006:274), secara matematis pengukuran ekonomi dapat dilakukan dengan perhitungan pengukuran kinerja elemen ekonomi pada Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2015-2016 yang bisa dilihat pada Gambar 2.

**Tabel 1. Pengukuran Ekonomi Pada Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah**

Pengukuran Ekonomi pada Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

No	Kegiatan	2015				2016			
		Anggaran	Realisasi	capaian	output	Anggaran	Realisasi	capaian	output
1	Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	801,500,000.00	523,521,850.00	65.32	100	768,260,000.00	640,533,750.00	83.37	100
2	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	215,800,000.00	173,548,179.00	80.42	100	349,800,000.00	281,936,029.00	80.60	100
3	Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemkab Blitar	34,266,500.00	31,522,500.00	91.99	100	37,778,816.00	34,522,000.00	91.38	100
4	Operasional Pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan	88,042,500.00	85,082,000.00	96.64	100	97,066,856.00	90,411,500.00	93.14	100
5	Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Aset Pemda	404,650,000.00	247,860,000.00	61.25	100	265,781,875.00	235,035,650.00	88.43	100
6	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah	101,100,000.00	95,018,850.00	93.99	100	111,462,750.00	107,480,000.00	96.43	100
7	Penyusunan Standart Harga Barang	242,400,000.00	180,560,000.00	74.49	100	255,297,533.00	246,865,700.00	96.70	100
Total		1,887,759,000.00	1,337,113,379.00	70.83	100	1,885,447,830.00	1,636,784,629.00	86.81	100

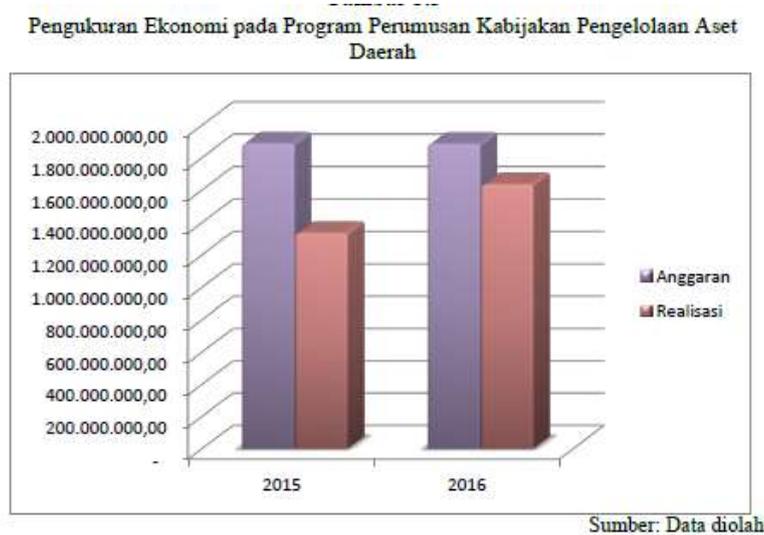
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKAD Kabupaten Blitar yang sudah diolah.

Data yang ditunjukkan dalam Tabel 2 diketahui bahwa pada Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah, realisasi anggaran BPKAD Kabupaten Blitar Untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.337.113.379,00 atau sebesar 70.83% dengan capaian anggaran terkecil 61,25% pada kegiatan Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Aset Pemda. Dengan capaian anggaran dibawah 100% tetapi *output* (keluaran) mencapai 100%. Dapat diartikan Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah tahun 2015 sudah berjalan secara ekonomis karena realisasi anggaran lebih kecil daripada yang telah dianggarkan.

Sedangkan pada tahun 2016, dapat diketahui pula pada tabel 3.2 Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah realisasi anggaran tidak sepenuhnya menggunakan anggaran yang telah dianggarkan. Realisasi anggaran mencapai 86,81% atau sebesar 1.636.784.629,00. Rata rata *output* (keluaran) pada program ini mencapai 100% tetapi pada kolom capaian anggaran (%) hampir ke tujuh kegiatan tidak secara penuh menggunakan anggaran yang telah dianggarkan. Hal ini dapat menghemat total anggaran program ini sebesar Rp 248.663.201,00. Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset

Daerah telah dapat dikatakan ekonomis karena realisasi anggaran lebih kecil disbanding anggaran yang telah dianggarkan.

Berdasarkan uraian dari data tabel diatas mengenai pengukuran ekonomi pada Progam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar tahun 2015-2016 dapat digambarkan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Pengukuran Ekonomi pada Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah**

### **Pengukuran Efisiensi**

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* (keluaran) yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Menurut Bastian (2006:275) semakin besar *output* yang dihasilkan dibanding *input* yang digunakan, maka semakin besar tingkat efisiensi suatu organisasi. Secara matematis, Mardiasmo (2009:133) merumuskan pengukuran efisiensi sebagai berikut:

Data *input* dan *output* dalam penelitian ini diperoleh dari data Pencapaian Realisasi Keuangan yang terdapat pada LAKIP BPKAD Kabupaten Blitar. Nilai *input* didapat dari persentase anggaran yang digunakan untuk menghasilkan *output*, sedangkan nilai *output* didapat dari persentase pencapaian setiap kegiatan. Tabel 2 menunjukkan hasil pengukuran kinerja elemen efisiensi pada Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2015-2016.

**Tabel 2. Hasil Pengukuran kinerja elemen efisiensi pada BPKAD kabupaten Blitar Tahun 2015-2016**

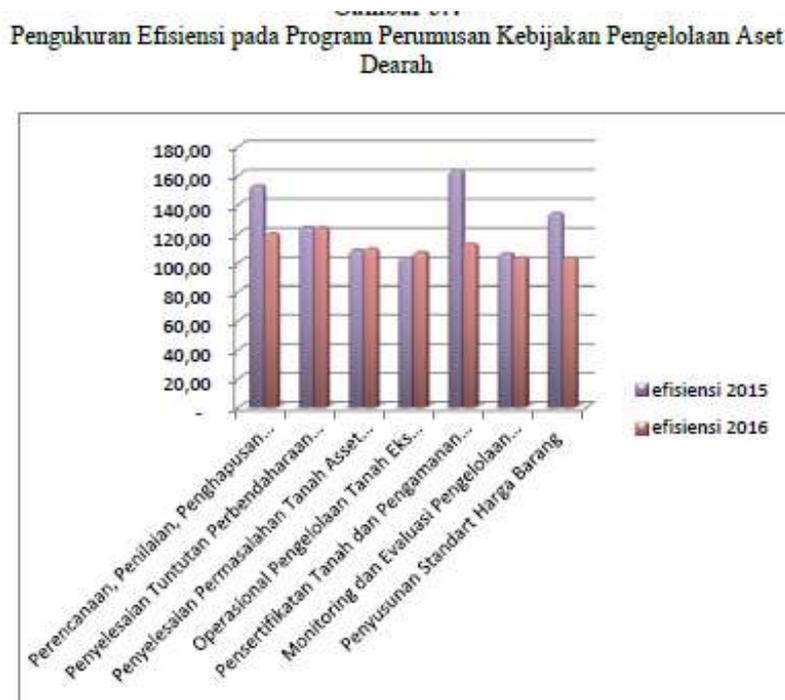
No	Kegiatan	2015		Efisiensi	2016		Efisiensi
		Input (%)	Output (%)		Input (%)	Output (%)	
1	Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	65.32	100	153.10	83.37	100	119.94
2	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	80.42	100	124.35	80.60	100	124.07
3	Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar	91.99	100	108.70	91.38	100	109.43
4	Operasional Pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Keurahan	96.64	100	103.48	93.14	100	107.36
5	Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemda	61.25	100	163.26	88.43	100	113.08
6	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah	93.99	100	106.40	96.43	100	103.71
7	Penyusunan Standart Harga Barang	74.49	100	134.25	96.70	100	103.42
Total		70.83	100	141.18	86.81	100	115.19

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKAD Kabupaten Blitar yang sudah diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 2, diketahui bahwa program sudah berjalan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi program ini pada tahun 2015 mencapai 141,18%, hal ini yang membuat Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah periode tahun 2015 secara keseluruhan dapat dikatakan efisien. Untuk periode tahun 2016 program ini juga sudah berjalan dengan efisien. Dapat terlihat pada tabel 3.3 bahwa besarnya efisiensi periode tahun 2016 lebih dari 100% dan dapat mencapai *output* maksimum yang pada semua kegiatannya mencapai 100% walaupun rasio efisiensinya mengalami penurunan pada tahun 2016 dibanding dengan tahun 2015.

Pada Tabel 2 mengenai pengukuran efisiensi pada Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah, kegiatan Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemda menunjukkan nilai efisiensi tertinggi pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016 nilai efisiensi tertinggi ada pada kegiatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang sama-sama mencapai *output* yang maksimum yaitu 100%.

Berdasarkan uraian dari data mengenai pengukuran efisiensi pada Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Data diolah

**Gambar 3. Pengukuran Efisiensi pada Progra, Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah**

### **Pengukuran Efektivitas**

Efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Mardiasmo (2004:124) suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian kerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu program/kegiatan dikatakan lebih efektif. Namun pada LAKIP BPKAD Kabupaten Blitar capaian kinerja tidak disajikan pada tiap program/kegiatan melainkan disajikan berdasarkan pencapaian Sasaran dengan beberapa Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur atau merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi, dengan rumusan lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran pada BPKAD Kabupaten Blitar mengalami perubahan dari tahun 2015 ke 2016 . Pada tahun 2015 ada 2 sasaran strategis yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah.

Pada tahun 2016 ada 4 sasaran, sasaran 1 dan 2 merupakan penunjang organisasi. Sementara sasaran strategis 3 dan 4 merupakan sasaran strategis utama SKPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut: erwujudnya manajemen organisasi yang professional, meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, optimalisasi pemanfaatan aset daerah

Sasaran yang berkaitan dengan pengelolaan aset berada pada nomor dua pada tahun 2015 dan nomor empat pada tahun 2016. Berdasarkan data dari sumber utama yaitu LAKIP BPKAD Kabupaten Blitar. Untuk menganalisis pengukuran kinerja dari elemen efektivitas, Tabel 3 menunjukkan hasil analisis yang disajikan dari data Indikator Kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar periode tahun 2015-2016.

**Tabel 3. Pengukuran efektivitas pada indikator kerja BPKAD Kabupaten Blitar**

### Pengukuran Efektivitas pada Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015		Efektivitas	2016		Efektivitas
			Target	Capaian Kinerja		Target	Capaian Kinerja	
1	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah	Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten	70	50	71.43%	80	50	63%
2		Persentase aset daerah yang telah dikelola	60	97.29	162%	80	97.29	122%

Sumber: : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKAD Kabupaten Blitar yang sudah diolah.

Berdasarkan Tabel 3 mengenai pengukuran efektivitas pada Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar periode tahun 2015-2016 yang berkaitan dengan pengelolaan aset di atas dapat diketahui bahwa ada dua Indikator Kinerja. Dari dua indikator kinerja tersebut ada 1 indikator kinerja yang persentasenya bahkan tidak mencapai 100% baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016 yang hanya mencapai 71.43% dan 63%.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Blitar periode 2015-2016 telah menjalankan satu program yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dengan kegiatan yang sama secara ekonomis, efisien dan efektivitas. Dua kegiatan dari total tujuh kegiatan dari periode 2015 ke 2016 mengalami kenaikan tingkat ekonomis. Berkaitan dengan pengukuran ekonomi, *output* pada setiap kegiatan yang dianalisis mencapai 100% yang secara keseluruhan dengan anggaran yang ekonomis. Karena keterbatasan data, maka analisis pengukuran efektivitas berdasarkan Indikator Kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Dua tahun periode tersebut ada dua indikator kinerja yaitu Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten dan Persentase aset daerah yang telah dikelola. Kedua indikator kinerja tersebut, pada Persentase aset daerah yang telah dikelola sudah berjalan secara efektif dan pada Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten diperlukan evaluasi karena capaian masih di bawah target yang ada.

BPKAD Kabupaten Blitar diharapkan lebih meningkatkan kinerja pada program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset sehingga dapat memaksimalkan kinerja pada setiap program atau kegiatan agar dapat terlaksana sesuai target dan tujuan yang diharapkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Gibson, J.L., J.M. Ivancevich, J.H. Donnelly, Jr., 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Moh. 2006. *Penilaian Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, Anwar Prabu AA. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: ANDI.
- Surya, Dharma. 2005. *Manajemen Kinerja (Falsafah teori dan penerapannya)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ulum, Ihyaul. 2004.*Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar)*.Malang: UMM Press